



Penataan Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Buntung Raih BKM Award 2017

## Karangwaru Riverside Awalnya Ditolak, Kini Terbaik Nasional



TIDAK UJUK-UJUK: Kerja keras semua elemen masyarakat membuahkan hasil dengan diberikannya anugerah BKM Award 2017 untuk Karangwaru Riverside.

Penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Buntung di wilayah Karangwaru, Tegalrejo, Kota Jogja, mendapat pengakuan nasional. Hasil kerja keras Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tridaya Waru Mandiri Karangwaru dan semua elemen masyarakat di kelurahan ini, dianugerahi BKM Award 2017.

**HERU PRATOMO, Jogja**

SUNGAI di Kota Jogja yang masih terlihat asri dan banyak fasilitas tambahan, salah satunya di Sungai Buntung yang melewati wilayah Karangwaru. Melalui Karangwaru Riverside, masyarakat di sana bersama-sama menata wilayahnya. Program penataan kawasan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dikerjakan BKM Tridaya Waru Mandiri Karangwaru, bukan tiba-tiba saja berhasil. Butuh proses panjang untuk mengajak peran serta masyarakat.

Salah seorang inisiator Karangwaru Riverside Subandono mengakui, tantangan terbesar adalah mengubah *mindset* masyarakat. Diakui, pada awalnya ada penolakan dari masyarakat, tapi dengan terus melakukan pendekatan akhirnya semua mau. "Bahkan sekarang keinginan, perencanaan hingga pelaksanaan pengerjaan Karangwaru Riverside berasal dari masyarakat," tuturnya.

Dalam perencanaannya, pembangunan Karangwaru Riverside terdiri atas enam segmen. Dari enam segmen itu, segmen tiga, lima dan enam yang belum tergarap

► Baca Karangwaru... Hal 7

1. ....  Negatif  Jumat Segora  Untuk Ditanggapi

# Tak Lagi Banjir, Warga Kini Rasakan Dampaknya

## ■ KARANGWARU...

Sambungan dari hal 1

"Kalau target kami sebelum program Kotaku selesai 2019 nanti, semua segmen sudah selesai," ujar Bandono.

Menurutnya, dengan pengerjaan Karangwaru Riverside masyarakat sudah bisa merasakan dampaknya. Paling tidak, yang dulu wilayahnya sering terendam air, sudah tidak lagi. "Kalau hujan tidak terlalu besar, tidak lagi terendam banjir," tuturnya.

Bandono menambahkan, program Kotaku semula adalah Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) berhasil karena kolaborasi dari semua elemen masyarakat. Melalui pemetaan swadaya yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, pelaksanaan

juga dari masyarakat. Diawali dengan swakelola dari yang diterima saat itu sebesar Rp 1 miliar, Rp 700 juta untuk pelaksanaan pembangunan fisik, Rp 200 juta untuk perencanaan, dan Rp 100 juta untuk pemasaran.

Hasilnya pada akhir tahun lalu empat menteri pemerintahan Joko Widodo, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono bersamaan datang ke sana. Puncaknya pekan lalu Kementerian PUPR juga menganugerahkan sebuah penghargaan sebagai BKM terbaik tingkat nasional dalam ajang BKM Award 2017.

Kasubdit Kawasan Pemukiman Perkotaan Dit PKP Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI Bobby Ali Ashari mengapresiasi kepada Karangwaru yang mendapatkan penghargaan itu. Bobby mengatakan, BKM Award diikuti dari 2.500 BKM di seluruh Indonesia. Pada 2017 ini, ada tiga BKM mendapatkan anugerah yakni di Kendari, Jogja, dan Bandung.

Bobby berharap BKM Karangwaru mendokumentasikan kegiatan mereka sejak awal hingga saat ini dalam sebuah buku. Buku itu yang akan dijadikan pegangan dan pembelajaran penataan kawasan kumuh. Ada cerita bagaimana proses awal bisa membongkar rumah, membebaskan lahan. "Ini semua harus direkam dalam sebuah buku, agar generasi kita selanjutnya bisa tahu bagaimana proses sampai ter-

jadi dengan saat ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi juga menilai penghargaan ini sebagai bukti kerja sama dan gotong royong antara warga, pemerintah, dunia pendidikan, dan swasta. Menurutnya, membangun itu tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus secara bersama sama atau gotong-royong.

"Bahasa Pak Gubernur, *ayo saiki keroyokan wae*," ujar Heroe menyitir ucapan Gubernur DIJ HB X. Keroyokan yang dimaksud adalah bagaimana pusat dan daerah berbagi beban dalam hal pendanaan.

"Keroyokan itu, pemerintah pusat ada alokasi dana apa, pemerintah provinsi alokasi adanya apa, pemerintah kota alokasi dana apa, dikeroyok supaya segera selesai persoalan pembangunannya," ungkap Heroe. (laz/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005